

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia merupakan sebuah masalah serius dan menempati industri terbesar kedua di dunia.¹Perdagangan manusia mengacu pada pelanggaran atas hak asasi manusia yang melakukan penyalahgunaan manusia sebagai komoditas. Fenomena perdagangan manusia banyak ditemukan di daerah yang cenderung miskin dan terpencil, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan lepas dari kemiskinan mendorong banyak korban untuk percaya dengan janji-janji para *trafficker*. Menurut data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2012 sekitar 21 juta orang korban kerja paksa dan penculikan, dan 4,5 juta orang dipaksa untuk melakukan eksploitasi seks.²

Pada tahun 2017 Amerika Serikat menyatakan bahwa Tiongkok merupakan negara terburuk dalam hal penanganan perdagangan manusia.³ Perdagangan manusia ke Tiongkok merupakan pelanggaran hak asasi manusia serius yakni sekitar 10.000 sampai 20.000 pertahun korban yang di kirim ke Tiongkok.⁴ Mayoritas korban perdagangan manusia yang di tujukan ke Tiongkok rata-rata berumur 13-24 tahun dan sumber utama perdagangan manusia yang di tujukan ke Tiongkok berasal dari *Great Mekong Sub Region* (GMS) yakni Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos, dan Myanmar. Hal ini disebabkan karena perbatasan

¹ UNICEF "EndTrafficking" <https://www.unicefusa.org/sites/default/files/assets/pdf/End-Child-Trafficking-One-Pager.pdf> (diakses pada 2 Februari 2018)

²Jane Ni,"Selling Bodies and Souls : Human Sex Trafficking in China" ,*College of Arts & Sciences Department of East Asian Studies* (2015): 1

³ Gardiner Harris," China Is Among Worst Human Trafficking Offenders, State Dept. Says "The New York Times, 27 Juni 2017, <https://www.nytimes.com/2017/06/27/world/asia/china-human-trafficking.html> (diakses pada 21 Maret 2018)

⁴TIP 2007 <http://www.state.gov/documents/organization/82902.pdf>, (dikses pada 19 februari 2018)

antara Kamboja, Tiongkok, Laos dan Vietnam terbuka dan patroli perbatasan yang longgar sehingga ribuan orang pertahun menjadi korban perdagangan manusia.⁵ Puncaknya pada tahun 2002 negara GMS dan negara Asia lainnya dikategorikan sebagai sumber utama perdagangan manusia ke Tiongkok.⁶ Diperkirakan bahwa sekitar 200.000 sampai 450.000 korban diperdagangkan pertahun di wilayah GMS.⁷ Berikut data jumlah kasus perdagangan manusia yang dirujuk ke Tiongkok :

TABEL 1.1 JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA KE TIONGKOK DARI NEGARA GMS

| Negara | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------|------|------|------|------|------|
| Laos | 298 | 128 | 100 | 53 | 106 |
| Vietnam | 1075 | 869 | 781 | 981 | 748 |
| Myanmar | 84 | 302 | 381 | 585 | 427 |
| Kamboja | - | 206 | - | 201 | 75 |
| Thailand | - | 56 | - | - | 138 |

Sumber: diolah oleh peneliti dari beberapa sumber⁸

Data tersebut menunjukkan bahwa, banyak korban dari negara GMS yang datang ke Tiongkok untuk dieksploitasi. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi yang tergolong berkembang serta berkembangnya migrasi tenaga kerja lintas batas membuat peluang terjadinya perdagangan narkoba dan perdagangan manusia.⁹ Maka untuk bangkit dari kemiskinan mendorong korban datang ke

⁵ Christopher Gan, Nong Thi Thuy Ha, Betty Kao, and Kongchheng Poch,” An Assessment of the Role of Nongovernment Organizations in Combating Trafficking of Women and Children in Cambodia and Viet Nam”, *Journal of GMS Development Studies*; Vol. 6, pp. 71–91, 2014 Asian Development Bank, : 72

⁶ Chris Beyrer dan Julie Stachowiak, “Health Consequences of Trafficking of Women and Girls in Southeast Asia”, *Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, The Brown Journal of World Affairs*:105

⁷ Joshua Becker,” Farm training the key to helping Laos human trafficking survivors”, News 8 Maret 2018, <http://www.abc.net.au/news/rural/2018-03-08/laos-human-trafficking-victims-learn-how-to-farm/9523992> (diakses pada 6 Mei 2018)

⁸ Nguyen Thi Hoai Duc, UNIAP 2010, AsianNews.it, Facts and details, J&C Service, Xinhua News Agency, Ramona Vijayarasa, J.B.Vu, Kate Hodal, Quanbao Jiang, Irin News.org ,Graeme Green, Siren Human Trafficking data sheet, Fact and Details, Ligia Kiss ,UN-ACT, Zhang Yan, Ligia Kiss

⁹” Human Resources Development”

Tiongkok. Dalam perkembangannya korban terbanyak dari perdagangan manusia ialah wanita dan anak-anak yakni sekitar 80% yang rentan terhadap modus dan terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia.

Faktor lainnya yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan manusia adalah kebijakan *One Child* yang mengatur secara ketat mengenai masalah kelahiran dengan memperbolehkan pasangan hanya memiliki satu anak.¹⁰ Sehingga berhasil menekan populasi dan angka kelahiran dan memunculkan masalah baru yaitu terjadi ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan, yaitu sekitar 20-40 persen yaitu 33,59 juta lebih besar dibanding jumlah perempuan.¹¹ Hal ini terjadi karena kepercayaan masyarakat Tiongkok terhadap pemikiran tradisional yang lebih meninggikan derajat laki-laki ketimbang perempuan yang mengakibatkan terjadi kasus aborsi dan pembunuhan bayi perempuan.¹² Maka diprediksi pada tahun 2020 Tiongkok mengalami surplus laki-laki usia kawin (19-45) yang mencapai 30 sampai 40 juta sulit mencari perempuan.¹³ Sehingga perempuan maupun anak-anak biasanya dijual kepada laki-laki yang memiliki ekonomi menengah kebawah di wilayah terpencil, hal ini

<http://www.gms-eoc.org/uploads/resources/149/attachment/6.Challenges-and-Responses.pdf> : 237 (diakses pada 30 April 2018)

¹⁰ Irena Debora Vega S, "Dampak Kebijakan Satu Keluarga Satu Anak di Cina" *Universitas Indonesia*, (2014) : 1

¹¹ Ervan Handoko, "Mahar Pernikahan Makin Mahal, Banyak Pria China Sulit Dapat Istri" *Kompas*, 24 Februari 2017

<http://internasional.kompas.com/read/2017/02/24/16220421/mahar.pernikahan.makin.mahal.banyak.pria.china.sulit.dapat.istri> (diakses pada 2 Maret 2018)

¹² Ronny Noor, "Pembelajaran dari Diakhirinya *One Child Policy* Cina" *Kompasiana*, 30 Oktober 2015 https://www.kompasiana.com/rnnoor/pembelajaran-dari-diakhirinya-one-child-policy-cina_563298b8b59373b5096deefc (diakses pada 2 Maret 2018)

¹³ Xinran Xue "Gendercide: The Worldwide War on Baby Girls" *The Economist*, 4 Maret 2010 <http://www.economist.com/node/15636231> (diakses pada 2 Maret 2018)

dikarenakan faktor biaya yang relatif lebih murah dibandingkan biaya pernikahan atau mahar.¹⁴

Perdagangan manusia ke Tiongkok merupakan sebuah kejahatan transnasional yang melibatkan para agen dengan membangun jaringan yang terorganisir. Pemerintah Tiongkok telah membuat ketentuan pada artikel 240 tentang *China's Law on the Protection of Rights and Interests of Women Criminal Code* untuk pelaku yang memiliki masalah serius yaitu dengan hukuman mati.¹⁵ Tiongkok telah meratifikasi *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* tahun 1979, *the UN Convention on the Rights of the Child (CRC)* tahun 1989, *the ILO Minimum Age Convention (No. 138)*, tahun 1973, dan *the ILO Worst Forms of Child Labour Convention (No.182)*, tahun 2002.¹⁶

Namun dibalik hal tersebut, Tiongkok tidak meratifikasi Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak (*Protokol Trafficking In Person*)¹⁷ Tiongkok tidak memiliki undang-undang perdagangan manusia, Tiongkok hanya memiliki Pasal 240 Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok (1997) mengenai perdagangan manusia (perempuan dan anak-



¹⁴ TIP 2008 <https://www.state.gov/documents/organization/105501.pdf> (diakses pada 3 Maret 2018)

¹⁵ Law on the Protection of the Rights and Interests of Women (P.R.C.) dalam Mary Catherine Hendrix, "Enforcing the U.S. Trafficking Victims Protection Act in Emerging Markets: The Challenge of Affecting Change in India and China", *Cornell International Law Journal* vol. 43, (2010) : 191

¹⁶ ILO-IPEC, "Yunnan Province, China Situation of Trafficking In Children And Women: A Rapid Assessment", Yunnan Province Women's Federation, (2002) : vii

¹⁷ Congressional-Executive Commission on China, "China's Anti-Trafficking Efforts Remain Inadequate One Year After Government's Release of National Action Plan" <https://www.cecc.gov/publications/commission-analysis/chinas-anti-trafficking-efforts-remain-inadequate-one-year-after> (diakses pada 15 februari 2018)

anak), yang tidak memenuhi standar internasional dengan mengecualikan pria sebagai korban potensial dari kejahatan ini.¹⁸

Hukum Tiongkok tidak mengatur bagaimana menghukum orang yang berusaha melakukan pelanggaran, berpartisipasi sebagai perantara dan mengatur atau mengarahkan orang lain untuk melakukan pelanggaran mengenai kejahatan perdagangan manusia.¹⁹ Tiongkok juga belum memiliki kebijakan mengenai eksploitasi pekerja, sehingga Tiongkok tidak melakukan perlindungan privasi dan identitas terhadap korban.²⁰ Disamping itu pemerintah tidak menerapkan langkah-langkah untuk menyediakan kebutuhan fisik, psikologis dan pemulihan sosial korban, termasuk perumahan yang layak, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan. Tiongkok hanya mendeportasi korban-korban yang datang pada saat ditemukan, padahal jika tidak ditangani atau direhabilitasi korban masih rentan dan dapat masuk kembali ke dalam perdagangan manusia.²¹

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok hanyalah memulangkan korban, disamping itu Vietnam tidak menyediakan pelayanan bagi korban perdagangan.²² Tiongkok hanya melakukan pelayanan terhadap korban perdagangan manusia yang memiliki beberapa kriteria yakni korban yang terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), korban yang sedang hamil serta

¹⁸The Law Library of Congress "Training Related to Combating Human Trafficking in Selected Countries" *Report for Congress* (2016) : 24

¹⁹UNIAP, "Human Trafficking Laws Legal Provisions for Victims Comparing Legal Definitions & Frameworks Against the United Nations Protocol on Human Trafficking"

²⁰ Combating Human Trafficking in China dalam Mary Catherine Hendrix, "Enforcing the U.S. Trafficking Victims Protection Act in Emerging Markets: The Challenge of Affecting Change in India and China", *Cornell International Law Journal* vol. 43, (2010) : 192

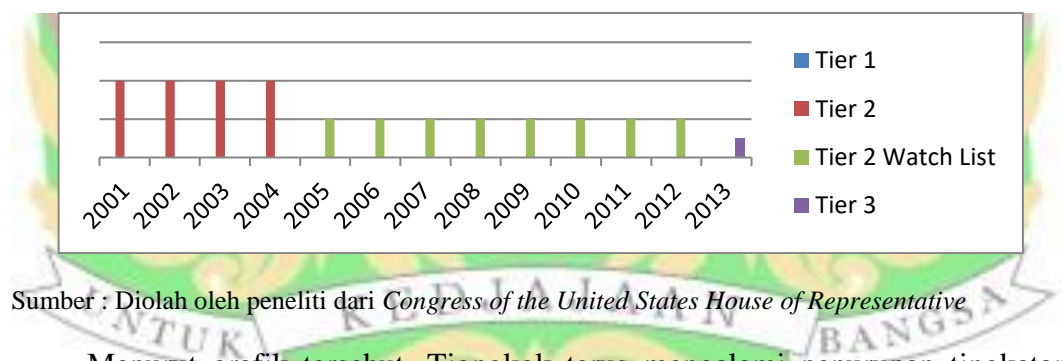
²¹ UNIAP, Human Trafficking Laws Legal Provisions for Victims "Comparing Legal Definitions & Frameworks Against the United Nations Protocol on Human Trafficking"

²²Surtees, R. "After Trafficking: Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the Greater Mekong Sub-region" Bangkok : UNIAP/NEXUS Institute (2013): 46

korban yang telah memiliki anak ketika kembali ke negara asalnya.²³ Namun hal ini juga tidak dijalankan oleh Tiongkok, beberapa oknum pemerintah Tiongkok tidak peduli akan pelayanan setelah korban dieksploitasi.²⁴ Pada beberapa kasus korban tidak dapat kembali langsung ke negaranya sebelum identitasnya dikonfirmasi, sehingga korban menunggu selama 1 tahun sebelum kembali kenegaraanya.²⁵ Selanjutnya pada kasus yang dialami oleh perempuan Myanmar sebagai korban pernikahan paksa yang berusaha kabur, namun polisi Tiongkok menangkap dan mengembalikan korban kepada suaminya tanpa menyelamatkannya.²⁶

Sehingga ada indikasi Pemerintah Tiongkok tidak menganggap serius dan tindakan pemerintah Tiongkok belum sepenuhnya mematuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia. Hal ini dibuktikan berdasarkan undang-undang perdagangan manusia di Amerika Serikat yaitu *Trafficking Victims Protection Act (TVPA)*.²⁷

GAMBAR 1.1 TIER TIONGKOK



Menurut grafik tersebut, Tiongkok terus mengalami penurunan tingkatan *Tier*. Tingkatan *Tier* merupakan pengklasifikasian atau pengkategorisasi

²³ Ibid

²⁴ Ibid 51

²⁵ Ibid 73

²⁶ Graeme Green, "The Burmese brides trafficked into China to marry total strangers", Metro 11 Februari 2013 <http://metro.co.uk/2013/02/11/the-burmese-brides-trafficked-into-china-to-marry-total-strangers-3398396/> (diakses pada 9 Mei 2018)

²⁷ TIP 2009 <http://www.state.gov/documents/organization/123357.pdf> (diakses pada 14 maret 2018)

berdasarkan tinggi rendahnya berbagai negara berdasarkan upaya untuk mengeliminasi perdagangan manusia. Pemerintah Tiongkok diklasifikasikan berada pada posisi *Tier 2 watch list* selama 8 tahun, untuk memperingatkan Tiongkok yang telah bertahun-tahun berada pada posisi *Tier 2*. Hal ini terjadi karena Tiongkok tidak melakukan upaya pemberantasan perdagangan manusia sesuai dengan standar minimum, tetapi ada kemampuan dan memiliki sumber daya untuk memenuhi standar minimal penghapusan perdagangan manusia.

Perdagangan manusia memberikan beberapa dampak negatif terhadap Tiongkok yaitu,

1. Ketidakjelasan status kewarganegaraan atas anak hasil perdagangan manusia akan sulit untuk diberikan pelayanan fisik, kesehatan maupun lainnya.²⁸ Tiongkok akan mengkategorikan anak hasil pernikahan yang tidak didaftarkan sebagai bayi ilegal sehingga sulit untuk mengatur populasi Tiongkok. Menurut *Chinese scholars* “*marriage migrants create a headache for the local government’s population control policy because they ‘undermine’ China’s population security*”.²⁹
2. Perkawinan lintas batas yang tidak didaftarkan merugikan imigran dan Tiongkok, karena Tiongkok akan mengidentifikasi orang-orang yang tidak memiliki dokumen sebagai orang yang ilegal sehingga akan di deportasi. Tiongkok akan mengkategorikan mereka sebagai korban perdagangan manusia daripada sebagai pengungsi, karena negara dapat memulangkan

²⁸ Muh Shamil “Tak Tahan Hidup di Negaranya Banyak Rakyat Korea Utara Melarikan Diri ke Negara Tetangga” Koran Sindo 11 februari 2015
<https://nasional.sindonews.com/read/962915/149/banyak-rakyat-korea-utara-melarikan-diri-ke-negara-tetangga-1423632759/> (diakses pada 6 februari 2018)

²⁹Elena Barabantseva, “When borders lie within: ethnic marriages and illegality on the Sino-Vietnamese Border”, *International Political Sociology* :15

korban perdagangan manusia namun tidak dapat mengembalikan pengungsi ketempat atau negara asalnya.³⁰

3. Korban perdagangan manusia yang datang secara ilegal tidak dapat menikmati akses kesehatan sehingga rentan menularkan HIV AIDS.³¹

Pada tahun 2005 terdapat 650.000 orang terinfeksi HIV yang meningkat setiap tahunnya antara tahun 2005 dan 2013, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.³²

TABEL 1.2 HIV / AIDS DI TIONGKOK 2005-2014

| Klasifikasi | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PLHIV (perkiraan) | 650.000 | 700.000 | 740.000 | 780.000 | - | 810.000 | - |
| PLHIV (dilaporkan) | - | - | 272.000 | 352.000 | 385.817 | 436.817 | 500.679 |
| AIDS | 75.000 | 85.000 | 105.000 | 154.000 | 145.463 | 173.825 | 204.683 |
| Infeksi HIV | 70.000 | 50.000 | 48.000 | 48.000 | 82.434 | 90.119 | 103.501 |

Sumber : Ming-Bo Huang, Li Ye, Bing-Yu Liang, Chuan-Yi Ning, WilliamW. Roth, Jun-Jun Jiang, Jie-Gang Huang, Bo Zhou, Ning Zang, Michael D. Powell, Hao Liang, dan Vincent C. Bond, "Characterizing the HIV/AIDS Epidemic in the United States and China", *International Journal of Environmental Research and Public Health*,(2015): 3

4. Menurunkan citra Tiongkok baik secara regional dan Internasional yaitu
- Pada tahun 2013 Amerika Serikat mengkategorikan Tiongkok, Rusia dan Uzbekistan sebagai negara yang gagal dalam menangani kasus perdagangan manusia, sehingga mereka diturunkan pada *Tier 3*.³³
- Selanjutnya pada tahun 2017 Amerika Serikat menyatakan bahwa Tiongkok sebagai negara terburuk dalam hal penanganan perdagangan

³⁰“ The Rights of Non-Citizens: Refugees and the Stateless”, <http://shapesea.com/wp-content/uploads/2016/02/HR-Textbook-Ch-6-Refugees-and-Stateless-Ed-1.pdf> : 141

³¹Surtees, R, (2013)“After Trafficking: Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the Greater Mekong Sub-region” Bangkok : UNIAP/NEXUS Institute : 124

³²Ming-Bo Huang, Li Ye, Bing-Yu Liang, Chuan-Yi Ning, WilliamW. Roth, Jun-Jun Jiang, Jie-Gang Huang, Bo Zhou, Ning Zang, Michael D. Powell, Hao Liang, dan Vincent C. Bond, “Characterizing the HIV/AIDS Epidemic in the United States and China”, *International Journal of Environmental Research and Public Health*,(2015): 2

³³ Annie kelli,” US condemns China, Russia and Uzbekistan for human trafficking”, The Guardian 19 Juni 2013 <https://www.theguardian.com/global-development/2013/jun/19/us-china-russia-uzbekistan-human-trafficking> (diakses pada 18 Mei 2018)

manusia.³⁴ Penetapan ini dapat memberikan dampak terhadap Tiongkok yakni pemberian sanksi dengan pembatasan hubungan diplomatik sesuai dengan hukum Amerika Serikat.³⁵

Dari tindakan pemerintah Tiongkok tersebut, dapat disimpulkan bahwa memang Tiongkok lebih mengesampingkan upaya dalam menangani perdagangan manusia. Hal ini didukung oleh penelitian Arie Widowati yang mengatakan bahwa masalah perdagangan manusia termasuk ke dalam agenda *low-politics*, sehingga Tiongkok dan Myanmar tidak terlalu berfokus dalam upaya penyelesaiannya.³⁶

Namun Tiongkok memperlihatkan keinginan untuk menangani masalah perdagangan manusia melalui kerjasama dengan 6 negara *Great Mekong Subregion* (GMS) melalui MOU *the Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking* (COMMIT). COMMIT didirikan pada tahun 2004 melalui kerjasama regional GMS yang merupakan program dari UNIAP (*United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking*). UNIAP memfasilitasi keenam negara GMS untuk mendirikan kerjasama MOU COMMIT dan mendirikan *Sub-Regional Plan of Action*. Masing-masing negara diuntut bukan hanya melakukan kerjasama MOU regional namun juga kerjasama MOU bilateral untuk memperkuat kerjasama dalam upaya penghapusan perdagangan manusia.

³⁴ Gardiner Harris, "China Is Among Worst Human Trafficking Offenders, State Dept. Says" *The New York Times*, 27 Juni 2017, <https://www.nytimes.com/2017/06/27/world/asia/china-human-trafficking.html> (diakses pada 21 Maret 2018)

³⁵ Robbie Gramer dan Bethanny Allen-ebrahimian, "With Human Trafficking Report, Tillerson Rebukes China on Human Rights," *Foreign policy* 27 Juni 2017 <http://foreignpolicy.com/2017/06/27/with-human-trafficking-report-tillerson-rebukes-china-on-human-rights/> (diakses pada 18 Mei 2018)

³⁶ Arie Widowati, "Evaluasi Kerjasama Tiongkok-Myanmar Dalam Menangani Perdagangan Perempuan Pada 2008-2013", *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 1, (2016) : 85

Dalam mengimplementasikan *National Plan of Action* (NPA) sebagai upaya dalam menangani masalah perdagangan manusia. Tiongkok melalui *The Chinese National Plan of Action on combating human trafficking in women and children 2008-2012* mengimplementasikan NPA kedalam kebijakannya.³⁷ NPA ini bertujuan untuk meningkatkan mekanisme koordinasi dan perlindungan anti-perdagangan manusia, dengan memperkuat kerjasama, membangun mekanisme anti-perdagangan manusia yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan pencegahan, pemberantasan, bantuan dan rehabilitasi. Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan perdagangan manusia dan meringankan kerusakan fisik dan psikologis yang dialami oleh perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan.³⁸

Namun NPA yang dijalankan oleh pemerintah kurang mengalokasikan dana dan pemerintah Tiongkok tidak menuntut atau memberikan hukuman terhadap oknum yang terlibat, serta NPA hanya menangani masalah *sex trafficking* perempuan dan tidak menangani masalah *labor trafficking* dan *sex trafficking* laki-laki.³⁹ Maka NPA belum berjalan maksimal, sehingga menurut *Study on Trafficking, Exploitation and Abuse in the Greater Mekong Subregion* (STEAM) pada tahun 2010-2013 Tiongkok berada di posisi 2 sebagai negara tujuan perdagangan manusia seperti yang tertera di bawah ini:

³⁷Sean Michael Barbezat, "Trafficking of Women and the Harmonious Society: The Chinese National Plan of Action on Combating Trafficking in Women and Children within the Context of Chinese Patriarchy and Reform" *Human Right & Human Welfare*, : 3

³⁸ State Council of China, China National Plan of Action on Combating Trafficking in Women and Children 2008-2012, (2007) : 3 http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/11/NAP-China_2008-2012.pdf

³⁹ Susan Tiefenbrum, "Human Trafficking in China" , *University of St. Thomas Law Journal* Volume 6, (2008)

TABEL 1.3. NEGARA TUJUAN EKSPLOITASI TAHUN 2010-2013

| No. | Negara | Jumlah | Persentase |
|-----|----------------|--------|------------|
| 1. | Thailand | 448 | 40,7 |
| 2. | Tiongkok | 330 | 30,0 |
| 3. | Indonesia | 129 | 11,7 |
| 4. | Malaysia | 52 | 4,7 |
| 5. | Mauritius | 33 | 3,0 |
| 6. | Kamboja | 7 | 0,6 |
| 7. | Rusia | 6 | 0,5 |
| 8. | Afrika Selatan | 6 | 0,5 |
| 9. | Vietnam | 3 | 0,3 |
| 10. | Lain-lain | 1 | 0,1 |

Sumber : *Study on Trafficking, Exploitation and Abuse in the Greater Mekong Subregion (STEAM) "Health and human trafficking in the Greater Mekong Subregion Findings from a survey of men, women and children in Thailand, Cambodia and Viet Nam"*

Berdasarkan pemaparan diatas, ada indikasi bahwa pemerintah Tiongkok terkesan mengabaikan isu perdagangan manusia. Padahal Tiongkok mengalami kerugian atas kasus tersebut. Maka masalah inilah yang menjadi latar belakang peneliti untuk membahas mengapa masih belum efektifnya penanganan kasus perdagangan manusia oleh pemerintah Tiongkok dan hambatan-hambatan seperti apa yang dialami oleh pemerintah Tiongkok.

1.2 Rumusan masalah

Pada tahun 2017 Amerika Serikat menyatakan bahwa Tiongkok merupakan negara terburuk dalam hal penanganan perdagangan manusia. Perdagangan manusia tujuan Tiongkok merupakan dampak dari kebijakan *One Child*, sehingga untuk menanganinya pemerintah Tiongkok meratifikasi beberapa konvensi dan bekerjasama dengan COMMIT. Namun tindakan tersebut masih belum tidak efektif dan kasus perdagangan manusia tujuan Tiongkok masih tetap terjadi. Isu perdagangan manusia memang bukan merupakan *high politic*, namun pemerintah Tiongkok dirugikan atas kasus perdagangan ini.

Maka masalah inilah yang menjadi latar belakang peneliti dalam menganalisis mengapa penanganan kasus perdagangan manusia ke Tiongkok masih belum maksimal ditangani oleh pemerintah Tiongkok.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab melalui penelitian adalah: mengapa penanganan kasus perdagangan manusia ke Tiongkok masih belum maksimal ditangani oleh pemerintah Tiongkok tahun 2008-2012?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan penanganan kasus perdagangan manusia tujuan Tiongkok
2. Menganalisis mengapa penanganan kasus perdagangan manusia ke Tiongkok masih belum maksimal ditangani oleh pemerintah Tiongkok tahun 2008-2012?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi dan menambah pengetahuan dalam bidang keilmuan Hubungan Internasional mengenai kejahatan transnasional.
2. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi akademisi keilmuan Hubungan Internasional dalam menelaah masalah serupa mengenai dinamika negara dalam menangani kasus perdagangan manusia.

1.6 Studi pustaka

Fungsi dari studi pustaka ini adalah untuk memperlihatkan hasil penelitian terdahulu sebagai salah satu sumber acuan khusus bagi penulis untuk menambah referensi dan sebagai bahan pertimbangan yang mempunyai tema maupun pola yang sama dengan penelitian ini. Studi pustaka ini dapat berwujud skripsi, jurnal, laporan penelitian, tesis, disertasi serta laporan penelitian lainnya.

Pertama, dalam penelitian Yusnarida Eka Nizmi yaitu “Memahami Problematika Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyelundupan Orang di Tiongkok”.⁴⁰ Dalam tulisan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa perdagangan dan penyelundupan menjadi sebuah kejahatan yang berkembang dan mendapat perhatian dari dunia. Perdagangan manusia di Tiongkok dikendalikan oleh geng-geng (*Snakeheads*) Tiongkok yang mengontrol bisnis perdagangan di seluruh dunia. Para korban awalnya diseludupkan dan ditipu dengan motif dijual untuk eksploitasi. Fakta bahwa pemerintah Beijing dan *Non-governmental organizations* (NGO) sudah melakukan investigasi terhadap isu ini yaitu Proyeknya *All- China Women’s Federation* dan *International Labor Organization* (ILO) di provinsi Yunnan untuk melawan perdagangan manusia. Proyek ini disebut sebagai “pilot mekanisme” untuk mengatasi persoalan ini melalui kerjasama yang ekstensif antara berbagai elemen pemerintah dan komunitas.

Selain itu Tiongkok telah berpartisipasi dalam konferensi-konferensi internasional dalam rangka memerangi perdagangan manusia yaitu pada April 2003, perwakilan Tiongkok menghadiri *Second Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*,

⁴⁰ Yusnarida Eka Nizmi, “Memahami Problematik Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyelundupan Orang di Cina”, *Universitas Riau*, (2016)

yang diadakan di Bali, Indonesia. Perdagangan manusia terjadi sebagai dampak Globalisasi yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan terhadap para korban dan melanggar hak asasi manusia. Peradaban masyarakat Tiongkok memang menunjukkan kemajuan, namun perdagangan ini justru menjadi perdagangan di era modern Tiongkok sebagai bentuk perbudakan modern. Penelitian ini memberikan informasi bagi penulis tentang keterlibatan para geng-geng untuk melancarkan bisnis perdagangan manusia di Tiongkok serta upaya organisasi internasional (OI) dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, penelitian diatas berfokus kepada kelompok kejahatan transnasional, sementara penelitian yang peneliti bahas berfokus secara menyeluruh penanganan isu perdagangan manusia ke Tiongkok.

Kedua, dalam penelitian Irena Debora Vega S yaitu “Dampak Kebijakan Satu Keluarga Satu Anak di Tiongkok”.⁴¹ Dalam tulisan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan satu keluarga satu anak di Tiongkok terjadi akibat faktor kebudayaan yakni pola pikir masyarakat yang masih dipengaruhi oleh kebudayaan tradisional. Kebudayaan Tiongkok ini telah diwariskan secara turun-temurun yang menyebabkan keluarga di Tiongkok lebih menganggap anak laki-laki lebih mulia dan menguntungkan daripada anak perempuan. Selain itu adanya program pemerintah yang mengatur mengenai masalah kelahiran yang membuat keluarga-keluarga di Tiongkok menelantarkan maupun membunuh anak-anak perempuan. Sehingga memunculkan masalah sosial yaitu perdagangan manusia yang merupakan kasus tindak kriminal yang melakukan pelanggaran hak asasi

⁴¹Irena Debora Vega S, “Dampak Kebijakan Satu Keluarga Satu Anak di Cina” *Universitas Indonesia*, (2014)

manusia (HAM). Penelitian ini memberikan informasi bagi penulis tentang faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia ke Tiongkok.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus analisis, penelitian diatas berfokus kepada analisa kebijakan *One Child*, sementara penelitian yang peneliti bahas berfokus kepada analisis penanganan isu perdagangan manusia ke Tiongkok.

Ketiga, dalam penelitian Isti Nur Rahmawati yaitu “Evaluasi Hasil Implementasi *the Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking Sub-Regional Plan of Action (COMMIT SPA)* dalam Menangani *Human Trafficking* di Thailand periode 2011-2013”.⁴²Dalam tulisan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi COMMIT SPA dalam mencegah perdagangan manusia di thailand tidak mengurangi angka perdagangan manusia periode 2011-2013 karena adanya kepentingan Thailand yang tidak sesuai dengan anggota COMMIT yang mendapatkan keuntungan di bidang pariwisata dan perikanan. Sehingga pemerintah Thailand agak mengesampingkan HAM demi mendapatkan keuntungan negaranya. Penelitian ini memberikan informasi bagi penulis bahwa negara akan memiiah untuk mengesampingkan HAM demi mencapai kepentingan lain.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada negara dan fokus penelitian, penelitian diatas berfokus kepada COMMIT di Thailand sementara penelitian yang peneliti bahas berfokus pada analisis penanganan isu perdagangan manusia ke Tiongkok.

⁴² Isti Nur Rahmawati “ Evaluasi Hasil Implementasi *the Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking Sub-Regional Plan of Action (COMMIT SPA)* dalam Menangani Human Trafficking di Thailand periode 2011 2013” ,*Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 2*,(2015)

Keempat, dalam penelitian Susan Tiefenbrun yaitu “*Human Trafficking in China*”.⁴³ Dalam tulisan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa perdagangan manusia berakar dari kebijakan *One Child* dan kebudayaan Tiongkok yang lebih memuliakan laki-laki, sehingga pemerintah melakukan pemaksaan aborsi dan sterilisasi. Maka untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia, Pemerintah melakukan implementasi kebijakan *National Action Plan*, namun NPA masih kurang efektif. Pemerintah Tiongkok tidak mengalokasikan banyak dana, dan NPA hanya menangani masalah *sex trafficking* perempuan dengan mengabaikan *labor trafficking* terutama korban pria. Selain itu pemerintah Tiongkok tidak menuntut, mengusut dan menghukum oknum yang terlibat. Penelitian ini memberikan informasi bagi penulis bahwa Tiongkok dalam menangani isu perdagangan manusia masih menunjukkan sikap kurang bersungguh-sungguh.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus analisis, penelitian diatas berfokus kepada analisa faktor budaya sebagai penyebab perdagangan manusia, sementara penelitian yang peneliti bahas berfokus kepada analisis menyeluruh penanganan isu perdagangan manusia ke Tiongkok.

Kelima, dalam penelitian Quanbao Jiang yaitu “*Trafficking in Women in China*”.⁴⁴ Dalam tulisan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa di wilayah pedesaan Tiongkok terdapat banyak pria dewasa yang belum memiliki pendamping hidup. Pria di wilayah pedesaan memiliki status sosial yang rendah serta tidak memiliki pendidikan yang cukup membuat pria tersebut susah mendapatkan pendamping. Maka mereka memilih untuk membeli perempuan dari luar negeri yang difasilitasi oleh kejahatan terorganisir yakni *individual trades*,

⁴³ Susan Tiefenbrun “Human Trafficking in China”, *University of St Thomas Law Journal volume 6 issue 1 article 14*, (2008)

⁴⁴ Quanbao jiang”Trafficking in Women in China” ,*Xian Jiatong University China*, (2011)

guerilla trades dan *legion*. Penulis memberikan saran terhadap pemerintah untuk memberikan perhatian lebih dalam menangani perdagangan manusia, melakukan kerjasama antar departemen yang berbeda dengan memobilisasi masyarakat dan memberikan hukuman berat terhadap pembeli. Penelitian ini memberikan informasi bagi penulis bahwa adanya permintaan dari masyarakat Tiongkok dan keterlibatan jaringan terorganisir sehingga kasus perdagangan manusia tetap terjadi.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus analisis, penelitian diatas berfokus kepada status sosial sebagai penyebab perdagangan manusia dan keterlibatan kelompok jaringan terorganisir, sementara penelitian yang peneliti bahas berfokus kepada analisis menyeluruh penanganan isu perdagangan manusia ke Tiongkok.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Human Trafficking*

Menurut *Article 3 of the United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2000)* perdagangan manusia ialah :

“Trafficking in persons’ shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”⁴⁵

⁴⁵United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime” (2000) <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx> (diakses pada 9 Maret 2018)

Selanjutnya menurut beberapa sumber, perdagangan manusia ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pengekapan baik antar daerah ataupun antar negara dengan meliputi korban anak-anak, perempuan, maupun laki-laki. Dimana korban digunakan untuk tujuan kerja paksa, eksploitasi seksual, pengangkutan organ, adopsi ilegal, pengedar obat terlarang, mengemis ataupun pelanggaran hak asasi manusia lainnya melalui tindakan ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, penganiyaan, migrasi ilegal serta penyalahgunaan kekuasaan.

1.7.2 Role of State in Human Trafficking

1.7.2.1 Role of State

Negara secara aktif menangani perdagangan manusia dengan memiliki undang-undang perlawanan perdagangan manusia yang disebut dengan anti perbudakan modern. Negara juga berkomitmen untuk bekerjasama dalam menumpas perdagangan manusia dengan negara lain. Negara akan mengimplementasikan undang-undangnya dengan melakukan *task force* secara nasional dan subnasional yakni dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia. Dalam menangani pelaku perdagangan manusia, negara akan memberikan tuntutan pidana kepada pelaku dan berusaha menyelamatkan korban dengan melakukan rehabilitasi serta memberikan kewarganegaraan di tempat korban ditemukan.⁴⁶

Liberalisasi perdagangan memberikan kemudahan perpindahan produk, uang dan pelayanan sehingga negara memiliki permintaan akan manusia sebagai unit produksi dalam ekonomi yang mengabaikan hukum domestik imigrasi.

⁴⁶ Karen E. Bravo, "Interrogating the State's Role in Human Trafficking ", [*Indiana International & Comparative Law Review*, Vol 25 No:1 Februari \(2014\)](#)

Konsekuensinya merugikan manusia yang berusaha menghindari dampak negatif dari liberalisasi perdagangan di negara-negara asal untuk mencari peluang baru di negara-negara tujuan.

1.7.2.2 State Exploitation

Karen E. Bravo dalam artikel *interrogating the states role in human trafficking* memiliki konsep yakni *state exploitation*. Asumsi Karen negara akan dieksploitasi dan berpotensi untuk dieksploitasi oleh negara yang memiliki *power* lebih atau aktor privat atau swasta yang mendominasi. Aktor ini memanfaatkan struktur hukum internasional dan negara demi mendapatkan keuntungan dari pasar pekerja global dan untuk terlepas dari hukum kriminal internasional.⁴⁷

Sumber eksploitasi negara :⁴⁸

1. Quasi-sovereignty and the judicial equality of state

Sistim hukum internasional memiliki asas kesetaraan di mata hukum, sehingga semua negara berdaulat memiliki kedudukan status yang sama secara hukum. Namun keadaan tersebut berubah ketika negara terlibat dalam perjanjian internasional. Kedudukan yang sama secara hukum akan terabaikan oleh kekuatan ekonomi dan politik dari negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Sehingga negara yang lemah memiliki potensi untuk dieksploitasi dan ditekan oleh negara yang lebih kuat untuk mewujudkan kepentingan. Dalam konteks ini negara lemah dipaksa untuk mengabaikan isu perdagangan manusia karena desakan oleh negara yang memiliki *power* lebih.

2. The myth of sovereignty

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

Konsep kedaulatan bermakna kontrol negara atas wilayah dan masyarakat. Seberapa besar kontrol dan batasannya masih menjadi perdebatan. Sehingga kemudian ada negara yang mampu mengontrol wilayah namun tidak mampu menyediakan kebutuhan hukum, politik, ekonomi terhadap teritorialnya. Dampaknya masyarakat di wilayah tersebut menderita kemiskinan dan rentan dieksploitasi dan juga menghadapi perdagangan manusia.

3. *The state as a tool of private power*

Negara memiliki undang-undang serta kebijakan yang menguntungkan aktor privat atau aktor lain. Sehingga negara dijadikan alat bagi aktor demi mendapatkan keuntungan. Negara digunakan oleh aktor privat atau aktor lain agar negara tidak menyelenggarakan hukum yang merugikan aktor tersebut.

4. *The challenge of powerful non-state actors*

Meningkatnya *power* aktor privat dalam masyarakat sehingga mengganggu aktivitas pemerintah dalam memperkuat power politik dan ekonomi internasional. Aktor privat dalam aktifitasnya dapat memberikan tantangan sehingga negara menjadi tidak stabil dan menghalangi perlindungan warga negara. Aktor privat mengeksploitasi pemerintah yang dapat berupa perusahaan, kelompok militer dan jaringan transnasional.

Untuk mempermudah dalam operasionalisasi konsep, berikut disajikan tabel penyebab terjadinya perdagangan manusia berdasarkan konsep *state exploitation*.

TABEL 1.4 PENYEBAB TERJADINYA PERDAGANGAN MANUSIA BERDASARKAN KONSEP STATE EXPLOITATION

| No. | Sumber eksploitasi | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Faktor eksternal dari negara lain yang lebih kuat | Dalam konteks ini negara lemah dipaksa mengabaikan isu perdagangan manusia karena desakan oleh negara yang memiliki <i>power</i> lebih |
| 2. | Faktor internal yaitu ketidakmampuan negara | Negara tidak mampu menyediakan kebutuhan hukum, politik, ekonomi sehingga masyarakat rentan untuk dieksploitasi dan menghadapi perdagangan manusia |
| 3. | Aktor privat yang menggunakan negara sebagai alat | Negara memiliki undang-undang dan kebijakan yang menguntungkan aktor privat |
| 4. | Aktor privat yang memberikan tantangan terhadap negara | Meningkatnya <i>power</i> aktor privat sehingga mengganggu tindakan negara dalam melindungi masyarakat |

Sumber : Diolah oleh peneliti

Terkait dengan konsep diatas, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan keempat konsep sumber eksploitasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Metode penelitian kualitatif peneliti pilih karena metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.⁴⁹ Pendekatan deskriptif-analisis dilakukan dengan cara mentransformasi data mentah menjadi bentuk yang akan membuatnya mudah dipahami dan ditafsirkan dan menghasilkan informasi.⁵⁰

⁴⁹ John W. Creswell, *Quantitative, Quantitative and Mixed methods Approaches. Third Editions*, Sage publications, California, 2009, 4

⁵⁰ William G. Zikmund, *“Research Methods”* (Basic Data Analysis: Descriptive Statistics, 2003) : 1 (diakses pada 19 maret 2018)

Melalui metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis ini peneliti akan mengumpulkan data terkait isu perdagangan manusia ke Tiongkok dan perkembangannya, kemudian mendeskripsikan data-data tersebut dengan menggunakan konsep sumber eksploitasi negara dalam perdagangan manusia.

1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk lebih memahami sasaran dalam penelitian ini, peneliti membatasi analisa penanganan isu perdagangan manusia di Tiongkok tahun 2008 hingga 2012. Tahun 2008 dipilih penulis karena pada saat itu Tiongkok menunjukkan komitmen dalam menangani perdagangan manusia yang tergabung dalam COMMIT (salah satu program UNIAP) melalui *The Chinese National Plan of Action* pada tahun 2008-2012 untuk memerangi perdagangan perempuan dan anak-anak.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan dan diteliti.⁵¹ Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah Tiongkok. Sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang dapat mempengaruhi unit analisis.⁵² Maka unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah peningkatan kasus perdagangan manusia ke Tiongkok.

Level analisis adalah tingkatan analisa di dalam memahami fenomena yang ada dalam politik internasional. Mohtar Mas' oed membagi level analisis menjadi lima yaitu perilaku individu, perilaku kelompok, negara-bangsa, pengelompokan

⁵¹Endi Haryono dan Saptopo B. Ilkodar, *Menulis Skripsi, Panduan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005) : 33

⁵²Ibid

negara-negara dan sistem internasional.⁵³Sesuai dengan konteks penelitian ini, maka level analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu kawasan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu metode yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah dengan membaca literatur, dokumen, atau arsip yang tersimpan dalam perpustakaan dan berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak terkait, arsip-arsip, artikel, laporan-laporan dan sumber-sumber online. Berikut dipaparkan teknik pengumpulan data melalui tabel :

TABEL 1.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

| No. | Indikator Konsep | Data | Sumber data |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Faktor eksternal dari negara lain yang lebih kuat | Keikutsertaan Tiongkok dalam kerangka kerjasama internasional maupun perjanjian internasional | Situs maupun jurnal resmi |
| 2. | Faktor internal yaitu ketidakmampuan negara | Kebijakan negara | Jurnal atau artikel |
| 3. | Aktor privat yang menggunakan negara sebagai alat | Aktivitas aktor privat | Jurnal atau artikel |
| 4. | Aktor privat yang memberikan tantangan terhadap negara | Aktivitas aktor privat | Jurnal atau artikel |

Sumber : diolah oleh peneliti

Dari tabel tersebut terlihat sumber-sumber data untuk masing-masing indikator dari konsep penelitian. Namun terdapat beberapa jurnal dan buku rujukan utama yang penulis gunakan adalah (Quanbao Jiang, *Trafficking in Women in China*, 2011), (Susan tiefenbrun dan Christie J. Edwards,” Gendercide and the Cultural Context of Sex Trafficking in China) dan (Xin Ren ,” *Violence against Women under China’s Economic Modernisation: Resurgence of Women*

⁵³Ibid

Trafficking in China”). Oleh karena itu penulis menggunakan sumber-sumber data tersebut untuk mendukung penelitian dan analisis sehingga bisa menghasilkan jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang diajukan.

1.8.5 Teknik Pengolahan dan Metode Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, peneliti melakukan teknik pengolahan data dimulai dari penanganan isu perdagangan manusia Tiongkok dengan menggunakan konsep sumber eksploitasi oleh Karen E. Bravo dalam menganalisis penanganan perdagangan manusia ke Tiongkok. Terdapat empat sumber eksploitasi, yaitu. Faktor eksternal dari negara lain yang lebih kuat, Faktor internal yaitu ketidakmampuan negara, Aktor privat yang menggunakan negara sebagai alat, dan Aktor privat yang memberikan tantangan terhadap negara. Pemikiran dan asumsi dari konsep tersebut akan peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk membedah penanganan perdagangan manusia dengan mencari data yang berhubungan dengan pemikiran konsep tersebut dan pada akhirnya akan terlihat mengapa penanganan kasus perdagangan manusia ke Tiongkok masih belum maksimal ditangani oleh pemerintah Tiongkok serta hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Tiongkok.

1. 9 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan pentingnya isu ini diangkat, selanjutnya terdapat pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, teori atau konsep, serta metodologi penelitian yang akan dipakai pada penelitian ini. Pendahuluan akan memberikan gambaran penelitian yang akan diteliti.

BAB II. Perkembangan Kejahatan Perdagangan manusia di Tiongkok 2008-2012

Pada bab ini, yang akan dijelaskan bagaimana perkembangan dan bentuk – bentuk perdagangan manusia tujuan Tiongkok

BAB III. Analisis faktor yang mempengaruhi penanganan perdagangan manusia ke Tiongkok 2008-2012

Pada bab ini, yang akan dijelaskan faktor atau hambatan yang muncul dalam menangani perdagangan manusia tujuan Tiongkok menggunakan konsep sumber eksploitasi yakni Faktor eksternal dari negara lain yang lebih kuat dan Faktor internal yaitu ketidakmampuan negara

BAB IV. Analisis peran Tiongkok dalam menangani perdagangan manusia 2008-2012

Pada bab ini, akan menjelaskan bagaimana peran Tiongkok dalam menangani perdagangan manusia dengan menggunakan konsep sumber eksploitasi yakni Aktor privat yang menggunakan negara sebagai alat dan Aktor privat yang memberikan tantangan terhadap negara.

BAB V. Penutup/Kesimpulan

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dan saran

